

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
ABSTRAK.....	5
ABSTRACT.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Aborsi dan Aborsi Ilegal.....	10
2.2. Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal.....	11
2.3. Implementasi Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal.....	13
2.4. Teori Implementasi Kebijakan (<i>Policy Implementation Theory</i>) Grindle.....	14
2.5. Opini Publik Terkait Implementasi Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal.....	16
2.6. Kerangka Berpikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.3. Teknik Analisis Data.....	24
3.3.1. <i>Wordcloud</i>	25
3.3.2. <i>Project Maps</i>	25
BAB IV PROFILE KEBIJAKAN.....	27
4.1. Dinamika/Perubahan Peraturan Kesehatan Reproduksi Indonesia Sebagai Dasar Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal.....	27
4.2. Tujuan Kebijakan.....	28
4.3. Arah dan Langkah Pengimplementasian Kebijakan.....	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	30
5.1. Opini Publik Terkait Implementasi Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal dari Indikator <i>Content of Policy</i>	30
5.1.1. Tipe Manfaat (<i>Type of Benefits</i>).....	30
5.1.2. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (<i>Extent of Change Envisioned</i>).....	39
5.1.3. Sumber Daya yang Digunakan (<i>Resources Committed</i>).....	49
5.2. Opini Publik Terkait Implementasi Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal dari Indikator <i>Context of Implementation</i>	55
5.2.1. Power, Interest, and Strategies dari Aktor Pelaksana Kebijakan.....	55
5.2.2. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap para pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan (<i>compliance and responsiveness</i>).....	61



5.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelarangan Aborsi Ilegal.....	74
5.3.1. Alur Rujukan yang Kompleks.....	74
5.3.2. Masih Lemahnya Upaya Promotif dan Preventif.....	75
5.3.3. Kurang Meratanya Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Untuk Pelaksanaan Aborsi Legal Untuk Korban Perkosaan.....	77
5.3.4. Ketidakjelasan Kewenangan Terkait Kontrasepsi Darurat Bagi Korban Perkosaan.....	79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
6.1. Kesimpulan.....	82
6.2. Saran.....	82